

OMBUDSMAN MINTA POLDA MALUT BENAHI KINERJA

Senin, 18 November 2019 - Dian Megawati Tukuboya

TERNATE, OT- Â Ombudsman Republik Indonesia (RI) perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut),Â meminta kepada Polda Maluku Utara (Malut) untuk membenahi kinerja pada bidang pelayanan dan penanganan kasus.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Sofyan AliÂ Â mengatakan,Â Ombudsman melihat ada beberapa kekurangan dari pihak kepolisian dalam menangani laporan yang disampaikan oleh masyarakat.

Sofyan mengaku,Â Ombudsman sudah mendapatkan laporanÂ terkait pelayanan kepolisian. Dari laporan tersebut rata-rataÂ masyarakat keluhkanÂ lamanya penanganan laporanÂ olehÂ kepolisian.

"Memang ada jangka waktu dalam menindakÂ lanjuti sebuah laporanÂ olehÂ kepolisian, meskipun tidak secara tegas berapa hariÂ harus selesaiÂ ditindakÂ lanjuti," ujarnya.

Menurutnya, OmbudsanÂ melihat ada dua hal yang saat iniÂ harusÂ dibenahiÂ Polda, yakni proaktif kepolisian dan responsif terhadap laporan yang masuk. "IniÂ yang kurang sehingga harus dibenahi," katanya.

Sofyan menjelaskan, jika dilakukan pendalaman dan pengkajian lebih jauh terhadap kepolisian, yang ditemukan ada beberapa kendala, yakniÂ dari sisi mekanisme dan prosedur penanganan laporanÂ menjadi kemungkinan masih kurangnya alat bukti dan kesulitan dalam menemukan bukti-buktiÂ sertaÂ lainnya.

Selain itu,Â kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)Â dan ketersediaan anggaran dalam menindaklanjuti laporan.

"Faktor ini yang sering mengemuka oleh kepolisian. Tapi paling tidak komunikasi dan interaksi dengan pelapor harus ditingkatkan, itulah proaktif dan responsifnya kepolisian terhadap masyarakat yang menyampaikan keluhan dan laporan kepada kepolisian," ujarnya.

Dia menambahkan, jikaÂ dalam proses penangananÂ laporan dinilai lambat penanganannyaÂ dan sudah koordinasikanÂ denganÂ Kepolisian tetapi tidak ada informasi apapun yang didapatkan, maka Ombudsman secara terbukaÂ menerimaÂ pelapor untukÂ membuat aduan sehingga OmbudsanÂ bisaÂ lakukanÂ diklarifikasi keÂ Polda.

"Kalaupun upaya itu sudah dilakukan dan tidak ada informasi apapun yang didapatkan dari Polda, maka pelapor bisa melaporkan langsung keÂ Ombudsman untuk mengklarifikasi terkait kinerja Polda," katanya.

Â (MG_02)